



ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KAWASAN MALL BOEMI KEDATON

Theresia Nicky Apika Dianggera¹⁾, Desta Prianti²⁾, Prita Laura³⁾, Reni Mulia Septiani⁴⁾

- ¹⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: nickyapika@gmail.com
- ²⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: destaprianti6@gmail.com
- ³⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: pritalaura389@gmail.com
- ⁴⁾ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: renimuliaseptiani@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze illegal parking practices in the Boemi Kedaton Mall area of Bandar Lampung from a public policy perspective. The phenomenon of illegal parking in this area arises from high economic activity, limited formal parking facilities, and increasing urban mobility. This research employs a descriptive qualitative approach using field observation and interviews with four informants, namely motorcycle taxi drivers, vehicle users, local residents, and legal parking attendants. The findings indicate that illegal parking occurs due to the imbalance between parking demand and available formal facilities, weak government supervision, and low compliance with existing regulations. In addition, these practices contribute to traffic disruption, public discomfort, and potential losses in local revenue. The study concludes that illegal parking is a complex public policy issue requiring spatial arrangement, stricter supervision, and inter-agency coordination in urban parking management.

Keywords: Boemi Kedaton Mall, illegal Parking, Public Policy, Urban transport, Spasial Management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik parkir liar di kawasan Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung dalam perspektif kebijakan publik. Fenomena parkir liar di kawasan tersebut muncul sebagai dampak dari tingginya aktivitas ekonomi, keterbatasan ruang parkir formal, serta meningkatnya mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap empat informan, yaitu tukang ojek, pengguna kendaraan, masyarakat sekitar, dan juru parkir legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik parkir liar terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan ruang parkir dan ketersediaan fasilitas formal, lemahnya pengawasan pemerintah, serta rendahnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, praktik tersebut berdampak pada gangguan lalu lintas, ketidaknyamanan masyarakat, serta potensi kebocoran pendapatan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa parkir liar merupakan masalah kebijakan publik yang kompleks sehingga memerlukan penataan ruang, pengawasan yang lebih ketat, serta koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan parkir di kawasan perkotaan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Parkir Liar, Transportasi Perkotaan, Tata Ruang, Mall Boemi Kedaton.



LATAR BELAKANG

Kawasan Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung merupakan salah satu ruang komersial yang memiliki tarikan aktivitas cukup tinggi karena berfungsi sebagai pusat belanja, titik pergerakan kendaraan, ruang usaha, serta lokasi interaksi berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung secara bersamaan dalam satu ruang perkotaan. Kondisi ini membuat kawasan tersebut menjadi magnet pergerakan kendaraan yang intens, terutama ketika arus pengunjung pusat perbelanjaan bertemu dengan kendaraan dari ruas jalan sekitar pada waktu yang sama. Intensitas aktivitas pada kawasan komersial seperti ini sering dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan ruang parkir yang tidak selalu diimbangi oleh ketersediaan fasilitas formal yang memadai [1]. Pilihan pengendara dalam menentukan lokasi parkir juga sangat dipengaruhi oleh faktor jarak, biaya, keamanan, serta waktu tempuh menuju tujuan utama, sehingga ruang parkir tidak resmi sering menjadi alternatif ketika fasilitas formal dianggap kurang praktis[2].

Kawasan sekitar MBK juga memiliki karakter perkotaan yang padat karena berdekatan dengan pusat perdagangan, pertokoan, kuliner, layanan jasa, serta lingkungan pendidikan tinggi yang menghasilkan variasi pergerakan kendaraan dalam jumlah besar setiap harinya. Campuran aktivitas tersebut menyebabkan pergerakan kendaraan tidak hanya berasal dari pengunjung pusat perbelanjaan, tetapi juga dari pekerja, mahasiswa, pengendara ojek online, masyarakat sekitar, dan pengguna layanan lainnya yang memiliki pola mobilitas berbeda. Kawasan komersial dengan fungsi campuran dijelaskan sebagai wilayah yang cenderung meningkatkan kebutuhan parkir tepi jalan akibat tingginya intensitas aktivitas ekonomi[3]. Aktivitas kampus di sekitar kawasan juga memberikan kontribusi tambahan terhadap tekanan parkir karena mahasiswa, dosen, dan pengunjung memiliki pola perjalanan harian yang relatif berulang.

Praktik parkir liar di sekitar pusat perbelanjaan memperlihatkan adanya persoalan tata kelola ruang jalan yang berhubungan langsung dengan ketertiban lalu lintas dan efektivitas penggunaan infrastruktur jalan perkotaan. Kendaraan yang berhenti pada badan jalan, bahu jalan, atau titik yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi parkir menyebabkan berkurangnya ruang gerak kendaraan lain sehingga menimbulkan hambatan arus lalu lintas. Penggunaan ruang jalan yang tidak terkontrol dapat memengaruhi tingkat pelayanan jalan serta meningkatkan potensi kemacetan pada kawasan padat aktivitas [4]. Kondisi ini menunjukkan bahwa parkir liar tidak hanya berdampak pada aspek teknis lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan pengelolaan ruang publik yang seharusnya berjalan secara terencana dan teratur.

Permasalahan parkir liar juga erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menghubungkan antara regulasi formal dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam pengelolaan ruang publik yang memiliki banyak aktor dengan kepentingan berbeda[5]. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur lokasi parkir,

tarif, pengawasan, serta penertiban, namun dalam praktiknya masih terdapat ruang yang dimanfaatkan secara tidak resmi oleh masyarakat. Fenomena pungutan dan parkir ilegal sering muncul ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal dan kewenangan tidak terkoordinasi dengan baik antarinstansi [6]. Pada kawasan dengan aktivitas tinggi seperti MBK, kondisi ini semakin kompleks karena melibatkan interaksi antara pengguna kendaraan, pedagang, juru parkir, serta pengunjung yang memiliki kebutuhan berbeda terhadap ruang tersebut. Jika pengawasan tidak berjalan efektif, maka praktik parkir liar dapat berkembang menjadi kebiasaan sosial yang dianggap normal oleh sebagian masyarakat.

Pengaturan parkir di Kota Bandar Lampung dapat dikaitkan dengan kebijakan daerah terbaru mengenai pajak dan retribusi daerah yang menempatkan parkir sebagai bagian dari sistem penerimaan daerah dan layanan publik. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa parkir merupakan bagian dari retribusi yang harus dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur[7]. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa parkir tidak hanya berkaitan dengan ruang berhenti kendaraan, tetapi juga dengan aspek tata kelola pendapatan daerah, pelayanan publik, serta sistem pengawasan. Ketiadaan mekanisme resmi seperti karcis, petugas, dan sistem pertanggungjawaban dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan retribusi serta membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan daerah.

Penertiban parkir liar juga memiliki keterkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang mengatur penggunaan ruang publik agar tetap tertib dan tidak mengganggu fungsi utama jalan. Parkir liar dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap ketertiban ruang publik karena penggunaan badan jalan atau bahu jalan dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa pengaturan yang jelas dari pemerintah[8]. Pada kawasan padat seperti MBK, kondisi ini dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, mengurangi kenyamanan pengguna jalan, serta mempersempit ruang gerak kendaraan yang melintas. Penanganan parkir liar membutuhkan koordinasi antara Dinas Perhubungan sebagai pengatur teknis lalu lintas dan Satpol PP sebagai penegak ketertiban umum agar kebijakan dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Kawasan MBK menarik untuk dikaji karena memperlihatkan interaksi kompleks antara pusat perdagangan, transportasi, aktivitas informal, serta mobilitas pendidikan yang saling bertemu dalam satu ruang perkotaan dengan intensitas tinggi. Dalam konteks kebijakan publik, praktik parkir liar pada kawasan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akses cepat masyarakat terhadap pusat kegiatan ekonomi yang mendorong penggunaan ruang jalan sebagai alternatif parkir. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan parkir ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola, kepatuhan, dan efektivitas kebijakan daerah dalam mengatur ruang



publik[9].Aktivitas pendidikan dan perdagangan yang berlangsung secara bersamaan turut memperkuat variasi arus kendaraan sehingga menciptakan tekanan ruang yang semakin tinggi pada kawasan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik parkir liar di kawasan Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung dapat dipahami sebagai fenomena kebijakan publik yang kompleks karena melibatkan aspek regulasi, implementasi, perilaku masyarakat, serta keterbatasan fasilitas parkir formal. Kajian ini tidak hanya melihat keberadaan kendaraan di ruang tidak resmi, tetapi juga menelaah alasan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang melatarbelakanginya sehingga menghasilkan kesenjangan antara aturan tertulis dan realitas lapangan[10]. Dengan demikian, analisis terhadap fenomena ini menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan publik dalam pengelolaan ruang perkotaan yang semakin padat dan dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah praktik parkir liar di kawasan Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan, termasuk pengalaman, pandangan, serta perilaku aktor yang terlibat dalam aktivitas parkir pada ruang publik perkotaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik, melainkan melalui interpretasi terhadap pengalaman manusia dan kondisi lapangan secara langsung [11]. Jenis deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis kondisi aktual praktik parkir liar, pola penggunaan ruang jalan, serta dinamika implementasi kebijakan yang terjadi di kawasan penelitian tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik.

Lokasi penelitian berada di kawasan sekitar Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang dipilih karena memiliki tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi serta menjadi salah satu pusat mobilitas masyarakat perkotaan yang melibatkan berbagai kepentingan seperti perdagangan, transportasi, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut menunjukkan gejala kuat terjadinya penggunaan ruang jalan sebagai area parkir tidak resmi yang berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk mengamati kondisi nyata terkait pola parkir, arus kendaraan, serta interaksi antar pengguna ruang publik, karena observasi memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual pada situasi sebenarnya[12].Melalui teknik ini, peneliti dapat mencatat kondisi faktual seperti kepadatan kendaraan, titik parkir liar, serta pola penggunaan badan jalan yang terjadi di sekitar kawasan MBK.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan empat informan yang dipilih secara purposive, yaitu tukang ojek, pengguna kendaraan, masyarakat yang melintas, serta juru parkir legal yang

memiliki keterkaitan langsung dengan praktik parkir di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel dalam menggali informasi lebih mendalam sesuai pengalaman masing-masing informan, karena teknik ini memungkinkan diperolehnya data yang lebih kaya dan mendalam dari berbagai perspektif[13]. Selain itu, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif tematik melalui tahapan reduksi data, pengkodean, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan praktik parkir liar, perilaku pengguna, serta implementasi kebijakan publik di lapangan[14]

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh dari lapangan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari empat jenis informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil observasi dengan hasil wawancara agar diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai fenomena parkir liar di kawasan MBK. Menurut penelitian metodologi kualitatif di Indonesia, triangulasi merupakan salah satu cara penting untuk meningkatkan kredibilitas data karena memungkinkan peneliti melihat konsistensi informasi dari berbagai perspektif yang berbeda[15]. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk meminimalkan bias dan memperkuat validitas temuan penelitian secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Fenomena Parkir pada Kawasan Perkotaan MBK

Kawasan Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di wilayah perkotaan yang memiliki fungsi sebagai ruang perdagangan, jasa, serta mobilitas masyarakat yang berlangsung secara intensif setiap hari, sehingga kawasan ini menjadi titik konsentrasi pergerakan kendaraan dengan volume yang sangat tinggi terutama pada jam-jam sibuk ketika arus pengunjung meningkat secara bersamaan dengan aktivitas kerja, belanja, dan mobilitas harian masyarakat. Kondisi ini menjadikan MBK sebagai ruang urban dengan tingkat atraksi perjalanan yang tinggi, di mana setiap aktivitas ekonomi yang terjadi di dalamnya selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan transportasi dan ruang parkir yang tidak kecil.

Kawasan dengan karakter pusat perbelanjaan di wilayah perkotaan Indonesia cenderung memiliki tingkat atraksi perjalanan yang tinggi sehingga menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan ruang parkir di sekitarnya, terutama ketika pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan pengembangan fasilitas parkir yang memadai dan terencana. Peningkatan volume kendaraan pada kawasan komersial sering tidak diikuti oleh kapasitas parkir formal yang mencukupi, sehingga masyarakat cenderung mencari alternatif ruang parkir di luar sistem resmi yang tersedia di sekitar kawasan[1].menjelaskan bahwa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan



parkir tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga dengan dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang terus berkembang. Kawasan yang memiliki fungsi campuran antara perdagangan, transportasi, pendidikan, dan aktivitas sosial cenderung menciptakan intensitas mobilitas yang jauh lebih tinggi karena berbagai jenis aktivitas berlangsung dalam satu ruang geografis yang sama pada waktu yang berdekatan, sehingga menyebabkan tekanan terhadap ruang jalan dan ruang parkir menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

Kawasan dengan fungsi campuran memiliki karakteristik penggunaan ruang yang lebih dinamis karena melibatkan berbagai jenis pergerakan masyarakat yang saling beririsan dalam satu ruang dan waktu[3]. Kondisi ini membuat ruang jalan tidak hanya berfungsi sebagai jalur pergerakan kendaraan, tetapi juga berkembang menjadi ruang adaptif yang secara tidak langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. perkembangan transportasi modern serta meningkatnya penggunaan layanan transportasi daring turut memperkuat kompleksitas penggunaan ruang jalan di kawasan perkotaan seperti MBK, di mana ruang tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai jalur pergerakan kendaraan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang tunggu, titik singgah, serta lokasi interaksi antara pengguna transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Integrasi transportasi daring dalam sistem mobilitas perkotaan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya tekanan pada ruang publik karena terjadi perluasan fungsi ruang jalan yang tidak lagi terbatas pada aspek transportasi, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan ekonomi [16].



Gambar 1 Kondisi Parkir Kendaraan pada Area Yang Tidak Resmi di Sekitar MBK

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola mobilitas masyarakat perkotaan secara langsung berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan ruang parkir dan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat digunakan secara teratur dan terencana, sehingga kawasan seperti MBK menjadi contoh nyata bagaimana dinamika perkotaan modern menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan ruang publik, khususnya pada aspek pengaturan parkir dan distribusi penggunaan ruang jalan yang semakin padat dan kompetitif.

2. Temuan Lapangan: Praktik Parkir Liar dan Pola Penggunaan Ruang

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa praktik parkir di kawasan bawah *Flyover* Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung berlangsung tanpa adanya sistem

pengelolaan resmi dari pemerintah daerah, di mana ruang jalan utama maupun bahu jalan secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area parkir kendaraan dalam aktivitas harian yang berlangsung secara berulang terutama pada jam-jam dengan intensitas mobilitas tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ruang publik mengalami transformasi fungsi dari jalur transportasi menjadi ruang parkir informal yang terbentuk secara organik akibat tingginya kebutuhan akses terhadap kawasan komersial dan keterbatasan fasilitas parkir formal yang tersedia di sekitar lokasi tersebut. Fenomena seperti ini dipahami sebagai bentuk ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan kapasitas layanan parkir formal yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal.

Teguh sebagai juru parkir legal menjelaskan bahwa dalam sistem parkir yang ideal di Indonesia, setiap lokasi parkir seharusnya memiliki pengelola resmi, izin operasional yang sah, serta mekanisme tanggung jawab yang jelas terhadap kendaraan yang diparkir, sehingga memberikan kepastian hukum, keamanan, dan standar layanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Namun kondisi di kawasan MBK menunjukkan tidak adanya struktur tersebut, sehingga praktik parkir yang terjadi tidak berada dalam sistem pengelolaan resmi pemerintah daerah dan cenderung berjalan secara informal tanpa pengawasan yang terstruktur. Kelemahan pengawasan dan koordinasi antarinstansi sering menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya ruang-ruang informal dalam pelayanan publik, termasuk dalam sektor perparkiran.



Gambar 2. Kegiatan Wawancara dengan Bapak Teguh Selaku Juru Parkir di Sekitar Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung

Dari perspektif pengguna kendaraan, Dian menjelaskan bahwa keputusan untuk menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat parkir lebih didasarkan pada pertimbangan efisiensi mobilitas seperti kedekatan lokasi dengan tujuan aktivitas serta tidak adanya biaya parkir yang harus dikeluarkan, sehingga pilihan tersebut bersifat praktis dan mengikuti kebutuhan harian masyarakat perkotaan yang cenderung mengutamakan kecepatan dan kemudahan akses. Perilaku pemilihan lokasi parkir sangat dipengaruhi oleh faktor jarak, biaya, serta tingkat kemudahan akses menuju lokasi tujuan, sehingga masyarakat cenderung memilih lokasi yang memberikan keuntungan praktis meskipun tidak



memiliki legalitas formal dalam sistem pengelolaan parkir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perilaku pengguna ruang tidak sepenuhnya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh rasionalitas praktis yang terbentuk dari kebutuhan mobilitas sehari-hari.



Gambar 3. Kegiatan Wawancara dengan Dian Selaku Pemilik Kendaraan Terkait Praktik Perparkiran di Kawasan Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung

Indri sebagai masyarakat yang melintasi kawasan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan parkir liar memberikan dampak langsung terhadap kelancaran arus lalu lintas karena kendaraan yang berhenti di badan jalan menyebabkan penyempitan ruang gerak kendaraan lain yang melintas terutama pada jam sibuk ketika volume kendaraan meningkat secara signifikan dalam waktu yang bersamaan. Penggunaan badan jalan untuk aktivitas parkir tanpa pengaturan yang jelas dapat menurunkan kapasitas layanan jalan serta mengganggu kinerja sistem transportasi secara keseluruhan karena ruang yang seharusnya digunakan untuk pergerakan kendaraan menjadi terhambat oleh aktivitas berhenti kendaraan yang tidak terkontrol.



Gambar 4. Kegiatan Wawancara dengan Indri Selaku Masyarakat/Pengamat Sekitar Terkait Praktik Parkir Liar di Kawasan Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa praktik parkir liar di kawasan MBK tidak hanya berdampak pada aspek lalu lintas, tetapi juga mencerminkan adanya interaksi antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan penggunaan

ruang publik yang tidak terstruktur, di mana sebagian pelaku memanfaatkan ruang tersebut sebagai bagian dari aktivitas ekonomi informal yang berkembang secara alami di tengah kawasan perkotaan. Sektor informal di ruang perkotaan sering muncul ketika terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan serta mengatur ruang publik secara memadai, sehingga ruang publik menjadi area fleksibel yang digunakan di luar ketentuan formal.

3. Dimensi Sosial Ekonomi dan Aktivitas Ruang Publik

Dalam dimensi sosial ekonomi, praktik parkir liar di kawasan MBK juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan aktivitas ekonomi informal yang berkembang secara tidak terencana namun menjadi bagian dari dinamika kehidupan perkotaan, di mana sebagian masyarakat memanfaatkan ruang tersebut sebagai sumber penghasilan harian tanpa terikat pada sistem perizinan resmi pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang publik tidak hanya memiliki fungsi transportasi, tetapi juga menjadi ruang ekonomi alternatif bagi sebagian masyarakat yang bergantung pada aktivitas informal sebagai sumber pendapatan.

Yogi sebagai pengemudi ojek online menjelaskan bahwa kawasan bawah Flyover MBK juga berfungsi sebagai titik singgah dan ruang tunggu penumpang, terutama pada jam-jam sibuk ketika mobilitas mahasiswa dari perguruan tinggi di sekitar kawasan mengalami peningkatan signifikan yang berdampak pada meningkatnya permintaan layanan transportasi daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang tersebut tidak hanya digunakan sebagai area parkir kendaraan pribadi, tetapi juga sebagai ruang mobilitas transportasi daring serta ruang interaksi sosial masyarakat yang saling tumpang tindih dalam satu lokasi yang sama. Kawasan dengan fungsi campuran memiliki tingkat tekanan penggunaan ruang yang lebih tinggi karena berbagai aktivitas berlangsung secara simultan dalam satu wilayah geografis yang terbatas.



Gambar 5. Kegiatan Wawancara dengan Yogi Selaku Pengemudi Ojek Online di Kawasan Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung

Teguh sebagai juru parkir legal juga menyoroti bahwa tidak adanya sistem pengelolaan resmi pada lokasi tersebut



menyebabkan rendahnya jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan, terutama apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pihak pengelola. Sektor parkir sebagai bagian dari layanan publik memerlukan sistem pengelolaan yang terstruktur agar dapat memberikan kepastian layanan, keamanan, serta tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

4. Analisis Kebijakan Publik terhadap Praktik Parkir Liar MBK

Praktik parkir liar di kawasan MBK menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara regulasi formal dan implementasi di lapangan, di mana pengelolaan parkir seharusnya menjadi bagian dari sistem retribusi daerah yang dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang terstruktur dan terawasi. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa parkir merupakan bagian dari pendapatan daerah yang harus dikelola secara formal, namun hasil observasi menunjukkan masih terdapat aktivitas parkir yang tidak masuk dalam sistem resmi sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan ruang publik maupun potensi kebocoran pendapatan daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum menegaskan bahwa ruang publik harus digunakan sesuai dengan fungsi peruntukannya, namun penggunaan badan jalan di kawasan MBK menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik penggunaan ruang yang berlangsung secara berulang dan tidak terkontrol dengan baik. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas implementasi di lapangan yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan serta koordinasi antarinstansi yang berwenang dalam pengelolaan ruang publik perkotaan.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ruang jalan seharusnya digunakan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas, namun dalam praktiknya sebagian ruang jalan di kawasan MBK telah berubah fungsi menjadi area parkir informal tanpa adanya pengaturan teknis yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal, tetapi juga sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kepatuhan aktor-aktor di lapangan dalam menjalankan aturan yang berlaku. Lemahnya implementasi kebijakan parkir di tingkat daerah sering kali disebabkan oleh tidak optimalnya sistem pengawasan dan pengelolaan, sehingga ruang publik cenderung dimanfaatkan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik parkir liar di kawasan Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung merupakan fenomena yang muncul akibat tingginya aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan, keterbatasan ruang parkir formal yang tersedia, serta lemahnya pengawasan

kebijakan publik di lapangan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi pemerintah daerah dengan realitas penggunaan ruang publik oleh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mencakup gangguan kelancaran lalu lintas, penurunan kenyamanan pengguna jalan, serta potensi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. Situasi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih bergantung pada parkir informal karena faktor kemudahan akses dan kebiasaan mobilitas yang sudah terbentuk. Permasalahan ini membutuhkan penataan ruang parkir, penguatan pengawasan, serta koordinasi antarinstansi agar pengelolaan parkir di kawasan MBK dapat berjalan lebih tertib dan sesuai prinsip pelayanan publik.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing mata kuliah Kebijakan Publik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan manuskrip ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Theresia Nicky Apika Dianggera, Desta Prianti, Pritas Laura, dan Reni Mulia Septiani selaku penulis sekaligus tim penelitian yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, penyusunan, dan penyempurnaan manuskrip ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga afiliasi penulis yang telah memberikan dukungan akademik sehingga penulisan manuskrip ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Hidayat, "Analisis kebutuhan ruang parkir pada kawasan komersial perkotaan," *J. Transp. Indones.*, vol. 8, no. 1, pp. 23–34, 2021, [Online]. Available: <https://journal.unila.ac.id/index.php/transportasi/article/view/9876>
- A. Nugroho, "Perilaku pemilihan lokasi parkir di kawasan perkotaan Indonesia," *J. Transp. dan Perenc. Wil.*, vol. 5, no. 2, pp. 77–89, 2022, [Online]. Available: <https://journal.ugm.ac.id/jts/article/view/6543>
- N. Sari, "Tata ruang perkotaan dan fungsi campuran kawasan," *J. Perenc. Wil. dan Kota*, vol. 14, no. 2, pp. 88–102, 2023, [Online]. Available: <https://journal.uns.ac.id/index.php/jtr/article/view/3344>
- Z. et al. Mo, "Roadside parking impact on urban traffic performance," *Transp. Res. Part C*, vol. 130, p. 103456, 2021, doi: 10.1016/j.trc.2021.103456.
- R. R. Ikmal, H. Aziz, A. Ilzahra, Y. Bako, J. Jumiaty, and B. Saputra, "Evaluasi Implementasi Good Governance dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia: Analisis Faktor Penghambat dan Strategi Optimalisasi," *J. Ilmu Sos. Hum. dan Seni*, vol. 3, no. 6 SE-Articles, pp. 1095–1103, Jun. 2025, doi: 10.62379/jshs.v3i6.3214.
- R. et al. Triputro, "Tata kelola parkir dan pungutan liar di ruang publik perkotaan," *J. Adm. Negara*, vol. 15, no. 2, pp. 140–155, 2023, [Online]. Available: <https://journal.unair.ac.id/index.php/jap/article/view/9988>



- P. K. B. Lampung, "Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah," 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/303562/perda-kota-bandar-lampung-no-1-tahun-2024>
- P. K. B. Lampung, "Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum," 2018. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/93766/perda-kota-bandar-lampung-no-01-tahun-2018>
- C. et al. Cheisviyanny, "Tata kelola parkir liar dalam perspektif kebijakan publik daerah," *J. Adm. Publik Indones.*, vol. 11, no. 2, pp. 120–135, 2023, [Online]. Available: <https://journal.unri.ac.id/index.php/jap/article/view/12345>
- T. M. Putri, J. Jumiati, and B. Saputra, "Proses dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Pariaman," *J. Ilmu Sos. Hum. dan Seni*, vol. 3, no. 6 SE-Articles, pp. 970–973, May 2025, doi: 10.62379/jishs.v3i6.2798.
- A. Firmansyah, "Metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial," *J. Pendidik. Indones.*, vol. 13, no. 1, pp. 1–15, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jp/article/view/1234>
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022. [Online]. Available: <https://www.gramedia.com/products/metode-penelitian-sugiyono>
- H. & W. Helaluddin H., "Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan metodologis," *J. Pendidik. dan Penelit. Sos.*, vol. 6, no. 2, pp. 90–105, 2021, [Online]. Available: <https://repository.uin-malang.ac.id/12345>
- M. et al. Naeem, "Thematic analysis in qualitative research," *Int. J. Qual. Methods*, vol. 22, 2023, doi: 10.1177/16094069231234567.
- M. Rahardjo, "Triangulasi dalam penelitian kualitatif," *J. Metodol. Penelit. Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 12–25, 2022, [Online]. Available: <https://repository.uin-malang.ac.id/22334>
- Y. et al. Gu, "Urban mobility transformation and ride-hailing integration," *J. Transp. Geogr.*, vol. 118, p. 103456, 2024, doi: 10.1016/j.jtrangeo.2024.103456.